

# = AKSES OBAT MAHAL



Indonesia for Global Justice

## Artikel Monitoring / IGJ 2018

### Diskusi Akses Terhadap Obat Dalam AEPF

Asia-Europe People's Forum on Trade Justice & Corporate Accountability Thematic Circle diselenggarakan pada 18-23 Februari 2018 di Jakarta dan Solo. Agenda ini bertepatan dengan negosiasi CEPA UE-Indonesia ke-4 di Indonesia pada 19-23 Februari 2018, di Solo, Jawa Tengah. AEPF Week of Actions di Jakarta yang diselenggarakan pada 18-23 Februari 2018 telah menjadi proses penting untuk mengkonsolidasikan kembali gagasan masyarakat di berbagai wilayah dalam kisah perlawanan terhadap agenda perdagangan bebas dan dominasi Perusahaan Multinasional.

FTA digunakan oleh perusahaan untuk memonopoli kehidupan Rakyat. Setidaknya ada 4 aturan penting di bawah FTA yang mengancam kehidupan publik secara luas, yaitu: bab Investasi, bab layanan jasa, bab hak kekayaan intelektual, dan bab ekonomi digital.

#### Akses Terhadap Obat di Dalam EU CEPA

Salah satu aspek dalam EU CEPA yang akan menghilangkan akses publik dari obat-obatan murah adalah ketentuan dari hak kekayaan intelektual (HAKI). Hal ini karena ketentuan tentang HKI pada perlindungan paten telah memberikan hak monopoli bagi perusahaan farmasi multinasional terhadap obat-obatan. Ada 3 pembicara yang mengungkapkan monopoli TNC tentang obat-obatan dalam sesi IPR AEPF.

Salah satu aspek di dalam EU CEPA yang akan

menghilangkan akses publik dari kesehatan dan obat-obatan yang murah adalah aturan mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual (IPRs). Hal ini karena aturan tentang IPRs yakni tentang perlindungan paten telah memberikan hak monopoli bagi korporasi farmasi multinasional terhadap obat-obatan.

Joseph Puruganan menyampaikan, dalam FTA hari ini yang di dalamnya terdapat aturan tentang IPRs, ada dua hal penting yang akan terkait. Pertama pada bidang kesehatan (public health), dimana IPRs akan berdampak pada akses masyarakat terhadap obat-obatan dan kedua dalam bidang pertanian (agriculture), bagaimana IPRs akan memunculkan permasalahan hak petani terhadap benih (seed).

Lutfiyah Hanim menjelaskan bagaimana proses FTA yang berlangsung hari ini mendorong proposal TRIPS Plus. Aturan standar TRIPS WTO saja sudah cukup memberatkan bagi negara berkembang dan LDCs, ditambah lagi dengan aturan-aturan tambahan (TRIPS Plus). Bergabungnya sebuah negara dalam WTO akan berdampak pada kewajiban negara untuk melakukan penyesuaian dengan berbagai kebijakan WTO termasuk TRIPS. Sebelum bergabung dengan WTO, kebijakan pemerintah Indonesia terhadap perlindungan paten adalah 14 tahun, dan setelah bergabung menjadi 20 tahun.

Kebijakan perlindungan paten tersebut ternyata melahirkan monopoli dalam penyediaan obat-obatan yang pada



*Diskusi Pararel Akses terhadap obat di AEPF 2018 Jakarta*

akhirnya akan berdampak pada kematian yang lebih cepat bagi para penderita yang tidak bisa mengakses obat tersebut. Para penderita harus menunggu selama 20 tahun untuk bisa mengakses obat dengan harga murah. Seperti pada contoh obat ARV untuk HIV, pada tahun 2001 biaya yang dikeluarkan untuk obat tersebut adalah US\$10.000 per tahun, kemudian di tahun 2009 ketika muncul obat-obat generic maka biaya yang dikeluarkan untuk obat-obatan menjadi US\$50 pertahun. Keberadaan obat-obat generic akan sangat membantu bagi masyarakat di negara-negara berkembang dan terbelakang dalam mengakses obat karena harga yang lebih terjangkau, disamping juga menciptakan kompetisi yang sehat bagi industri farmasi.

Strategi yang dapat dilakukan negara berkembang dan LDCs dalam mengurangi dampak TRIPS adalah dengan memperjuangkan dan memaksimalkan penggunaan fleksibilitas TRIPS. Selama ini negara-negara maju seperti Amerika telah menggunakan fleksibilitas TRIPS untuk kepentingannya seperti menggunakan compulsory license dan Government use.

Kekhawatiran perundingan yang saat ini sedang dilakukan oleh Uni Eropa dan Indonesia terkait dengan IPR adalah masuknya ketentuan tentang data exclusive, yaitu pemberian waktu kepada perusahaan yang melakukan uji klinis, dapat perlindungan data uji klinis. Dalam hal ini Uni Eropa

mendorong untuk eksklusivitas data dalam paten diberikan tambahan waktu selama 10 tahun. Hal lain yang menjadi kekhawatiran dalam CEPA ini adalah dengan ditandatanganinya perundingan akan berdampak pada perubahan regulasi negara karena harus meratifikasi aturan-aturan yang disepakati disamping adanya clause harmonisasi.

Irwandy Wijaya yang bekerja dalam issue HIV Aids berdasarkan pengalamannya mengadvokasi keterjangkauan obat-obatan di Indonesia, menemukan bahwa sebenarnya biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi obat-obatan tidak terlalu besar. Penyebab tingginya harga obat disebabkan karena tingginya keuntungan yang ingin didapatkan perusahaan farmasi. Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan compulsory licenses, sayangnya penerapan kebijakan ini masih kurang maksimal.

Hal lain yang mejadi pekerjaan masyarakat sipil Indonesia untuk mendorong terciptanya akses murah terhadap obat-obatan adalah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ada banyak aturan yang didorong oleh perusahaan farmasi untuk bisa masuk dalam regulasi negara untuk meningkatkan keuntungan mereka, salah satunya adalah dengan mendorong perpanjangan masa patent seperti dorongan menyepakati data exclusivity. \*\*\*\*

**Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:**

**Indonesia for Global Justice**

**Komplek PLN Duren Tiga, Jl.Laboratorium No.7, Pancoran, Jakarta Selatan, 12760, Indonesia.**

**Email: [igj@igj.or.id](mailto:igj@igj.or.id) / Website: [www.igj.or.id](http://www.igj.or.id)**

**Telp: +62-21-7984552**



**INDONESIA**  
FOR GLOBAL JUSTICE